

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku atau E-Book :

Agustine, Oly Vianna. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.

Bentham, Jeremy. *A Fragment on Government*. Oxford: Clarendon Press, 1891.

Budhiati, Ida. *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Dimiyati, Khudzaifah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Herro, Hector Fix. *Courts, Justice and Efficiency, A Socio-Legal Study of Economy Rationaly in Adjudication*. Oregon: Hart Publishing, 2003.

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Kanter, E.Y., and S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2012.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- MaSariani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Nasution, M. Irsan, and M. Akmal F.I.N. *Hukum Pidana*. Bandung: UIN Bandung, 2021.
- Prakoso, Djoko, Bambang Riyadi Lany, and Amir Muhsin. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Umum, 1994.
- Rosadi, Aden. *Kekuasaan Kehakiman*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rosidah, Nikmah. *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salam, Faisal. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2006.
- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Babinkum TNI, 2010.
- Soeharto, Achmad. "Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Postivisme Hukum." *Jurnal PENA* 36, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 1986.
- Sariwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Sudiro, Ahmad, and Deni Bram. *Hukum Dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Susiani. *Kejahatan Militer : Desersi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Adalusia Bumi Pertiwi, 2013.
- Tambunan, A.S.S. *Hukum Militer Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2013.
- Tarigan, Andi. *Tumpuan Keadilan Rawls*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaritan Peradilan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Bandung Pada 4 Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer.

Surat Keputusan Panglima TNI No. : Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI.

C. Observasi/Wawancara :

Observasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB.

Wawancara bersama Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung, Ibu Sari Rahayu, S.H., M.H., di Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada hari Jumat 19 Januari 2024 dan hari Jumat 26 Januari 2024, pukul 10.00 WIB.

D. Artikel Jurnal atau E-Journal :

- Ariyanti, Vivi. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33.
<https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>.
- Aryo, Muhammad, and Dwinanda Mukti. “Pertanggungjawaban Komando Militer Dalam Kejahatan Perang.” *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 1 (2024): 18–27.
- Ayu, Citra, Kishardian Salsabila, M Daffa, Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan, and Sarah Hastriani. “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles.” *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, Dan Sosial Humanioral* 1, no. 1 (2023): 1–1.
<https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Bukhari, Anuar, and Muhammad Abudan. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Kasus Putusan Pm Nomor: 94-K/Pm.Iii-12/Ad/Vi/2015).” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 74.
<https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5182>.
- Disemadi, Hari Sitra, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 118–27.
<https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>.
- Karunia, Ana Aniza. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.
- Kurniawan, Zahri, Ilham Wahyudi, and H.S. Tisnanta. “The Right Non Self-Incrimination and Epistemology of Criminal Witnesses.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 4 (2020): 363–80.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no4.1988>.
- Ligasetiawan, Edwin, and Febby Mutiara Nelson. “Prinsip Kehadiran Terdakwa Pada Persidangan Pidana Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19:

- Perbandingan Indonesia Dan Belanda.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 69–103. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.69-103>.
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, and Raesitha Zildjianda. “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.
- Nur Aviva, Faradistia. “Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia.” *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 111–23. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>.
- Nurhasanah, and Rizanizarli. “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023): 284–93.
- Nyoman Agus Trisnadiasa, I, and Ni Komang Ratih Kumala Dewi. “Pemeriksaan Dan Putusan Tanpa Kehadiran Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadilan Kaitannya Dengan Hak Asasi Terdakwa.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasarwati Denpasar*, no. 1 (2021): 110–24. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara>.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.
- Prasetyo, Allan Hermit. “Kewenangan Ankum Terhadap Warga Negara Yang Dimobilisasi Dalam Hukum Disiplin Militer.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, no. 3 (2016): 559–72.
- Pratama, I Putu Siwa, and I Dewa Gede Dana Sugama. “Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online.” *Jurnal Kertha Desa* 10 (2020).

- Pahlevi, Farida Sekti. "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Justicia Islamica* 13, no. 2 (2016): 173.
<https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585>.
- Sari, Indah. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 23–43.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/766/763>.
- Setiawan, Agus. "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 204.
<https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>.
- Setiawan, David, Christopher Octavianus, Demas Janis, Guguh Winadi Yanuar Abdullah, Taufik Umasugi, and Handika Suyuti. "Perkembangan Hubungan Militer Dengan Sipil Di Indonesia." *Global & Policy* 1, no. 1 (2013): 74–83.
- Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16.
- Soemarsono, Maleha. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2017): 300.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.
- Suhenriko, Muhammad. "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 64–71.
- Talli, Abdul Halim. "Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 1–15. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1495/1456.
- Triningsih, Anna. "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law)." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 134.

<https://doi.org/10.31078/jk1218>.

Wulandari, Cahya. “Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>.

Yasir, Fathurrahman, Baharuddin Badaru, and Nasrullah Asryad. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum Bagi Prajurit TNI Di Lingkungan Peradilan Militer.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 9 (2021): 2461–77.

Yustitiantingtyas, Levina. “Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 1 (2016): 70–83.

E. Skripsi :

Marpaung, Seven Mangapul. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai (Studi Putusan Nomor : 26-K/PM 1-02/AD/III/2019).” Universitas HKBP Nommensen, 2021. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5662>.

Sailelah, Aswin Nugraha. “Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi.” Universitas Hasanuddin, 2020. <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>.

Sumber Internet :

Auli, Renata Christha. “Adagium Unus Testis Nullus Testis Dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP.” hukumonline.com, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adagium-iunus-testis-nullus-testis-i-dalam-pasal-185-ayat-2-kuhap-lt6582c3dd1d403/>.

Aulia, Renata Christha. “Catat! Ini 21 Asas Hukum Dan 7 Adagium Hukum Yang Perlu Dipahami.” hukumonline.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-21-asas-hukum-dan-7->

adagium-hukum-yang-perlu-dipahami-lt62d0b0c23e38e.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kendala.” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d. <https://kbbi.web.id/kendala>.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Tentara.” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d. <https://kbbi.web.id/tentara>.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Efektif.” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d. <https://kbbi.web.id/efektif>.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Militer.” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d. <https://kbbi.web.id/militer>.

Cornell Law School. “Military Law.” In *Legal Information Institute*, n.d. https://www.law.cornell.edu/wex/military_law.

Dhf. “Survei LSI: Kepercayaan Publik Ke TNI Lebih Tinggi Daripada Ke Jokowi.” *cnnindonesia.com*, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230712061326-32-972314/survei-lsi-kepercayaan-publik-ke-tni-lebih-tinggi-daripada-ke-jokowi#:~:text=Jakarta%2C CNN Indonesia --,institusi presiden sebesar 83 persen>.

Heriani, Fitri Novia. “Memahami Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana.” *hukumonline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-hak-hak-tersangka--terdakwa--dan-terpidana-lt6364fd07e90eb/>.

Heylaw Edu. “Bedah Materi PKPA: Bentuk-Bentuk Acara Pemeriksaan Persidangan Dalam Perkara Pidana.” *hey law.id*, 2022. <https://hey law.id/blog/bedah-materi-pkpa-bentuk-bentuk-acara-pemeriksaan-persidangan-dalam-perkara-pidana>.

Mahkamah Konstitusi RI. “Bahasa Perundang-Undangan Harus Jelas, Jernih, Dan

Sesuai Dengan Kebutuhan Hukum.” mkri.id, 2021.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17497&menu=2>.

Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Sumber Hukum Materiil Dan Sumber Hukum Formal.” hukumonline.com, 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-sumber-hukum-formal-lt6284c23d23320>.

Pengadilan Militer II-09 Bandung. “Kapita Selekta Proses Perkara Di Pengadilan Militer.” dilmil-bandung.go.id. Accessed April 27, 2024. <https://dilmil-bandung.go.id/peradilan-militer/>.

Permatasari, Erizka. “Arti Error in Persona Dan Error in Objecto Serta Contoh Kasusnya.” hukumonline.com, 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ierror-in-persona-dan-error-in-objecto-i-serta-contoh-kasusnya-cl220/>.

Pramesti, Tri Jata Ayu. “Tempat Kejadian Perkara, Daerah Hukum Polisi, Dan Kewenangan Relatif Pengadilan.” hukumonline.com, 2013.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tempat-kejadian-perkara--daerah-hukum-polisi--dan-kewenangan-relatif-pengadilan-lt519a80404efeb/>.

Rachmadsyah, Shanti. “Hak Untuk Mungkir.” hukumonline.com, 2010.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-untuk-mungkir-cl4616/>.

Sijabat, Togar S.M. “Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI Dan TNI.”

hukumonline.com, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-atas-bantuan-hukum-bagi-anggota-polri-dan-tni-lt5318063b49505/>.

Stubbs, William Edward, and James Stuart-Smith. “Military Law.” In *Britannica*, n.d. <https://www.britannica.com/topic/martial-law>.

Tim Hukumonline. “15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum.”

hukumonline.com, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>.

Tobing, Letezia. “Hak Dan Kewajiban Saksi Dalam Perkara Pidana.”

hukumonline.com, 2014. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana-lt5394538dd600b/>.

Tommy. “Kasdam IM: Desersi Pelanggaran Tertinggi Di Jajaran TNI.” ajnn.net, 2020. <https://www.ajnn.net/news/kasdam-im-desersi-pelanggaran-tertinggi-di-jajaran-tni/index.html>.

Utama, Abraham. “Desersi Dan Kejahatan Narkotika: Pelanggaran Tertinggi TNI.” cnnindonesia.com, 2016. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160115085558-20-104491/desersi-dan-kejahatan-narkotika-pelanggaran-tertinggi-tni>.

